



## Pengaruh Inflasi, Investasi Asing, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Liansyah Pratama<sup>1\*</sup>, Puti Andiny<sup>2</sup>, Yani Rizal<sup>3</sup>, Safuridar Safuridar<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Program Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samudra,  
Langsa – Aceh, Indonesia

[liansyahpratama003@gmail.com](mailto:liansyahpratama003@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [putiandiny@unsam.ac.id](mailto:putiandiny@unsam.ac.id)<sup>2</sup>, [yanirizal@unsam.ac.id](mailto:yanirizal@unsam.ac.id)<sup>3</sup>,  
[safuridar@unsam.ac.id](mailto:safuridar@unsam.ac.id)<sup>4</sup>.

Alamat: Jalan Prof Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh Tengah, Langsa – Aceh, Indonesia

Korespondensi penulis: [liansyahpratama003@gmail.com](mailto:liansyahpratama003@gmail.com)\*

**Abstract.** *This study aims to analyze the effect of inflation, foreign investment (PMA), value added tax (VAT), and income tax (PPH) on economic growth in Indonesia in the period 2009-2023. Using quantitative methods and multiple linear regression analysis, secondary data taken from the APBN and BPS portals were processed using Eviews 10. The results of the study indicate that inflation, foreign investment, VAT, and PPh partially do not have a significant effect on economic growth. This study reveals that although fiscal and monetary policies play an important role in economic stabilization, external factors such as the COVID-19 pandemic and global economic dynamics also have a major impact. The implications of this study highlight the importance of institutional and regulatory improvements to maximize the contribution of foreign investment and taxation policies to economic growth.*

**Keywords:** *Inflation, Foreign Investment, Value Added Tax, Income Tax, Economic Growth.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi, investasi asing (PMA), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPH) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada periode 2009-2023. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi linier berganda, data sekunder yang diambil dari portal APBN dan BPS diolah menggunakan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, investasi asing, PPN, dan PPh secara parsial tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun kebijakan fiskal dan moneter berperan penting dalam stabilisasi ekonomi, faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 dan dinamika ekonomi global juga memberikan dampak yang besar. Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya perbaikan kelembagaan dan regulasi untuk memaksimalkan kontribusi investasi asing dan kebijakan perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi.

**Kata kunci:** Inflasi, Investasi Asing, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pertumbuhan Ekonomi.

### 1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi adalah keadaan di mana aktivitas ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang dan jasa, yang tercermin dari kenaikan output per kapita dalam jangka waktu yang panjang. Jika perekonomian tidak mengalami peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi, maka kondisi tersebut akan menghambat tercapainya kesejahteraan. Tingkat pertumbuhan ekonomi biasanya disajikan dalam bentuk persentase, yang menggambarkan perubahan kondisi ekonomi dari tahun ke tahun. Indikator utama untuk menilai perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB), yang diperoleh dari total nilai barang dan jasa dari seluruh unit ekonomi dalam periode tertentu

Salah satu indikator utama dalam pembangunan ekonomi adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu (Simanjuntak dan Mukhlis, 2012). Pertumbuhan

ekonomi merupakan persoalan makroekonomi yang senantiasa dihadapi oleh setiap negara. Tantangan dalam pertumbuhan ekonomi ini terutama dialami oleh negara-negara berkembang, khususnya yang masih berada pada tingkat pembangunan dan kesejahteraan yang rendah.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan capaian dan keberhasilan suatu negara dalam mengelola kegiatan ekonominya dalam jangka pendek serta upayanya untuk mengembangkan ekonomi dalam jangka panjang. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB) atau GDP. Menurut Sukirno (2016), untuk memperoleh gambaran umum mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara, indikator yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil (PDB). PDB riil menghitung total nilai akhir dari semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perekonomian dalam kurun waktu satu tahun.

**Tabel 1. Pertumbuhan Ekonomi (PDB) di Indonesia**

| Tahun | Pertumbuhan Ekonomi (persen) |
|-------|------------------------------|
| 2019  | 5,02                         |
| 2020  | -2,07                        |
| 2021  | 3,70                         |
| 2022  | 5,31                         |
| 2023  | 5,05                         |

**Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia**

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami fluktuasi, pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai angka 5,02 persen, pada tahun berikutnya menurun sebesar -2,07 persen dimana angka ini menunjukkan penurunan yang sangat rendah pada lima tahun terakhir. Fluktuasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia terjadi karena adanya beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami pandemi disebabkan COVID-19 yang menjadi faktor utama terjadinya penurunan pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 dan 2021. Setelah itu, pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 ditopang oleh beragam faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang memacu peningkatan konsumsi, investasi, dan ekspor, serta percepatan digitalisasi dan pengembangan infrastruktur. Meskipun masih menghadapi tantangan berupa ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan tren pemulihan yang positif berkat pondasi domestik yang kokoh.

Sejak tahun 2020, perekonomian global dihadapkan pada tantangan inflasi yang semakin meningkat, terutama sebagai akibat dari dampak pandemi COVID-19 dan konflik

geopolitik, seperti perang Rusia-Ukraina. Inflasi dapat diartikan sebagai peningkatan harga barang dan jasa secara berkelanjutan yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan gangguan pada rantai pasokan global, dan ketika dikombinasikan dengan stimulus fiskal besar-besaran, hal ini memicu lonjakan permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan pasokan, sehingga mempercepat inflasi global pada tahun 2021-2022 (Rahman & Rayhan, 2023).

Investasi memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Namun, dinamika investasi global mengalami perubahan besar selama dekade 2020-an, terutama dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Dampak pandemi tidak hanya menyebabkan kontraksi ekonomi, tetapi juga memengaruhi strategi dan perilaku investasi di sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan menghadapi tantangan berat dalam menjaga aliran investasi akibat penurunan permintaan dan gangguan rantai pasokan global (Aukutsionek, 2020).

Pajak adalah kontribusi yang diberikan oleh masyarakat kepada negara sebagai sumber pendapatan negara, yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang tentang perpajakan. Pajak juga merupakan pungutan wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh rakyat guna membayarkan pajak akan masuk kedalam pos pendapatan negara yang nantinya masuk kedalam sektor pajak (Fitriano & Ferina, 2021).

Pajak memainkan peran penting bagi negara karena menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar. Saat ini, sekitar dua pertiga penerimaan negara berasal dari pajak. Di antara berbagai jenis pajak yang diterapkan di Indonesia, pajak penghasilan merupakan salah satu yang memberikan kontribusi terbesar dan berpengaruh terhadap peningkatan total penerimaan pajak. Hal ini dapat terlihat dari jumlah penerimaan pajak penghasilan yang terus meningkat dari tahun ke tahun (Kastolani & Ardiyanto, 2017). Sementara itu pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai merupakan jenis pajak dalam negeri dengan proporsi terbesar terhadap total penerimaan pajak dibandingkan jenis pajak lainnya. Pajak penghasilan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap penerimaan pemerintah serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia (Sihaloho, 2020).

**Tabel 2. Inflasi, Investasi Asing, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH)**

| Tahun | Inflasi (%) | Investasi Asing (%) | Pajak Pertambahan Nilai (%) | Pajak Penghasilan (%) |
|-------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 2019  | 2,72        | -3,75               | -1,05                       | 4,38                  |
| 2020  | 1,68        | 1,62                | -15,29                      | -23,08                |

|      |      |       |       |       |
|------|------|-------|-------|-------|
| 2021 | 1,87 | 8,47  | 22,56 | 17,28 |
| 2022 | 5,51 | 46,67 | 24,59 | 43,28 |
| 2023 | 2,61 | 10,22 | 11,06 | 6,31  |

**Sumber: Portal APBN Indonesia**

Berdasarkan Pada Tabel 2 dapat dilihat inflasi di Indonesia tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi, dimana pada 2019-2020 inflasi mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 1,68 persen, dan pada tahun 2021-2022 inflasi meningkat sebesar 1,87 persen dan terus meningkat sampai tahun 2022 sebesar 5,51 persen dan menurun atau stabil di angka 2,61 persen di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2019-2023 investasi mengalami peningkatan pada tahun 2019-2022 sebesar -3,75 persen menjadi 46,67 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 10,22 persen. Sedangkan pada tahun 2019-2023 pajak pertamabahn nilai juga mengalami peignkatan pada tahun 2019-2022 sebesar -1.05 persen menjadi 24,59 persen dan mengalami penurunan sebesar 11,06 persen di tahun 2023. Sedangkan pada tahun 2019-2023 pajak penghasilan juga mengalami fluktuasi, pada tahun 2019-2020 pajak pengahsilan menurun dari 4,38 persen menjadi -23,0 persen dan pada tahun 2021-2022 mengalami peningkatan dari 17,28 persen menjadi 43,28 persen dan menurun kembali pada tahun 2023 sebesar 6,31 persen. Secara umum, data menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia menghadapi tantangan yang besar akibat pandemi COVID-19, namun mampu menunjukkan pemulihan yang signifikan. Inflasi, investai asing, pajak pertambahan nilai pajak penghasilan meberikan pola yang serupa penurunan tajam selama puncak pandemi diikuti oleh pemulihan yang kuat pada 2021-2022, dan akhirnya stabilisasi pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang efektif, baik di bidang fiskal maupun moneter, serta kemampuan ekonomi Indonesia untuk beradaptasi terhadap tantangan global dan berfokus pada pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan pemaparan di atas, tujuan penelitian ini yaitu: (1) Apakah Inflasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2009-2023; (2) Apakah Investasi Asing (PMA) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indoensia periode 2009-2023; (3) Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Pertumbuhan periode 2009-2023; (4) Apakah Pajak Penghasilan berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia periode 2009-2023.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Pendapatan Nasional Bruto (PNB), tanpa memperhatikan apakah peningkatan tersebut lebih cepat atau lebih lambat dari laju pertumbuhan penduduk, serta tanpa mempertimbangkan perubahan dalam struktur ekonomi atau perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2017). Beberapa negara telah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pemerataan distribusi pendapatan dapat dicapai secara bersamaan, ketika keduanya berjalan beriringan.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya; kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya (Jhingan, 2016).

### **Inflasi**

Inflasi adalah fenomena kenaikan harga secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Istilah "kenaikan harga secara umum" merujuk pada kondisi di mana mayoritas barang dan jasa mengalami peningkatan harga, bukan hanya satu atau dua barang saja. Inflasi mencerminkan penurunan nilai mata uang suatu negara terhadap barang dan jasa yang dapat diperoleh dengan mata uang tersebut.

Di Indonesia, inflasi menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Dampaknya adalah mendorong masyarakat untuk lebih fokus bekerja daripada berinvestasi. Inflasi memiliki efek negatif, seperti menurunnya efisiensi dan produktivitas dalam proses produksi, meningkatnya biaya modal, serta ketidakpastian terhadap biaya dan pendapatan di masa mendatang (Salam, 2020).

### **Investasi Asing (PMA)**

Penanaman modal asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri dan mengalir ke sektor swasta, baik melalui penanaman modal langsung (direct investment) maupun penanaman modal tidak langsung (portofolio). Penanaman modal langsung (direct investment) adalah penanaman modal yang melibatkan penanam modal secara langsung dalam kegiatan usaha, sehingga memberikan pengaruh terhadap kebijakan perusahaan (Guild, 2023). Tujuan yang ingin dicapai dalam penanaman modal asing ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk penanam modal asing itu sendiri. Sementara itu,

penanaman modal tidak langsung (portofolio) adalah investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri, di mana investor membeli utang atau ekuitas dengan harapan memperoleh pengembalian finansial atas investasi tersebut. Penanaman modal asing (PMA) dapat diartikan sebagai kegiatan menanamkan modal di wilayah Negara Republik Indonesia, baik menggunakan modal asing sepenuhnya atau bekerja sama dengan penanam modal dalam negeri (Setiawati, 2023).

### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas nilai tambah yang dihasilkan selama setiap tahap dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Sebagai pajak tidak langsung, PPN dibayarkan oleh konsumen, tetapi pemungutannya dilakukan oleh para penjual yang kemudian menyetorkannya kepada pemerintah. Pajak ini memiliki peranan penting sebagai sumber pendapatan negara dan berdampak besar terhadap perekonomian secara keseluruhan. Menurut Acosta Ormaechea dan Morozumi (2023), pengumpulan PPN yang efisien, diimbangi dengan pengurangan pajak penghasilan, dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Pembayaran publik yang diterima negara (dikumpulkan sesuai dengan hukum) disebut sebagai penerimaan pajak. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara dan menjamin sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan pungutan adalah suatu jenis pendapatan yang didapatkan secara terus-menerus dan idealnya diciptakan oleh kebutuhan otoritas publik dan keadaan masyarakat, Sumber pendanaan negara lain yang juga digunakan untuk praktik sehari-hari adalah pendapatan dari pungutan ataupun konsumsi perbaikan (Muhammad & Sunarto, 2018).

### **Pajak Penghasilan (PPH)**

Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas pendapatan yang diperoleh oleh individu, perusahaan, atau entitas lain dalam suatu periode tertentu, umumnya setahun. Sumber penghasilan yang dikenakan pajak meliputi gaji, keuntungan usaha, dividen, bunga, sewa, dan bentuk pendapatan lainnya. Pajak ini berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan utama bagi negara, yang digunakan untuk mendanai berbagai pengeluaran pemerintah. Secara teori, dasar pajak penghasilan adalah konsep “kemampuan membayar” atau *ability to pay*, yang menyatakan bahwa individu atau entitas dengan penghasilan lebih besar memiliki tanggung jawab pajak yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan

menerapkan tarif pajak lebih tinggi pada mereka yang berpenghasilan besar dibandingkan dengan mereka yang berpenghasilan rendah.

Selain itu, Zucman (2021) mengembangkan teori optimal pajak penghasilan, yang menyoroti pentingnya menggabungkan prinsip distribusi dan efisiensi. Dalam konteks ini, distribusi beban pajak harus mempertimbangkan dampak terhadap kesejahteraan individu dan efek redistribusi yang diinginkan oleh pemerintah untuk mencapai keadilan sosial tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi.

### 3. METODE PENELITIAN

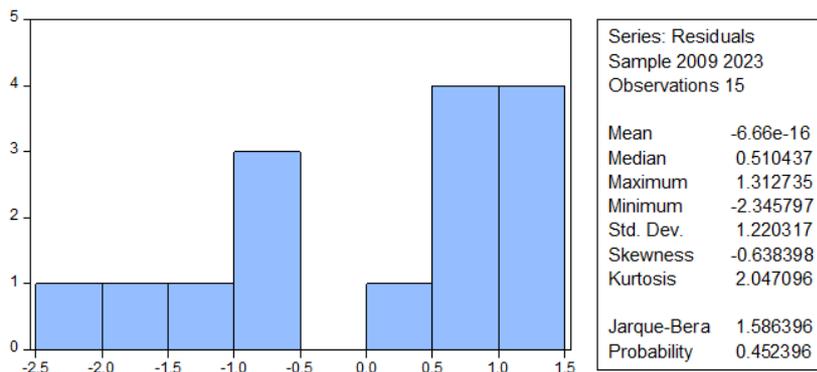
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan data skunder merupakan data berkala (time series) yang diperoleh dari portal APBN dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia. Data yang digunakan adalah data Inflasi, Investasi, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), dan Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2009-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda menggunakan *views* 10. Model analisis yang digunakan yaitu Uji asumsi Klasik (Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskesiditas, dan Uji Autokorelasi), dan Uji Persial (Uji – t) serta Uji  $R^2$ .

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas**



Sumber: estimate *Views*

Berdasarkan hasil uji yang ditampilkan pada tabel 3, nilai *Probability Jarque-bera* sebesar  $0,452396 >$  dari  $0,05$ , dapat disimpulkan pada uji ini data terdistribusi secara normal.

## Uji Multikolinieritas

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas**

|                            |             |            |          |
|----------------------------|-------------|------------|----------|
| Variance Inflation Factors |             |            |          |
| Date: 11/16/24 Time: 22:29 |             |            |          |
| Sample: 2009 2023          |             |            |          |
| Included observations: 15  |             |            |          |
|                            |             |            |          |
|                            |             |            |          |
|                            | Coefficient | Uncentered | Centered |
| Variable                   | Variance    | VIF        | VIF      |
|                            |             |            |          |
|                            |             |            |          |
| C                          | 0.741141    | 5.332350   | NA       |
| X1                         | 0.039807    | 6.171066   | 1.266945 |
| X2                         | 0.000833    | 2.872823   | 2.256438 |
| X3                         | 0.003172    | 5.269196   | 3.138672 |
| X4                         | 0.001601    | 3.082025   | 2.143747 |
|                            |             |            |          |
|                            |             |            |          |

**Sumber: estimate Eviews**

Berdasarkan hasil dari uji multikolinieritas yang ditampilkan pada tabel 4, di peroleh bahwa Inflasi(X1), Investasi Asing(X2), Pajak Pertambahan Nilai (X3), Pajak Penghasilan (X4), dan Pertumbuhan Ekonomi (Y1) tidak terdapat Multikolinieritas karena nilai VIF <10.

**Uji Heteroskedisitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedisitas**

| Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey |          |                     |  |        |
|--|----------|---------------------|--|--------|
|  |          |                     |  |        |
|  |          |                     |  |        |
| F-statistic                                    | 1.750833 | Prob. F(4,10)       |  | 0.2153 |
| Obs*R-squared                                  | 6.178200 | Prob. Chi-Square(4) |  | 0.1862 |
| Scaled explained SS                            | 1.437593 | Prob. Chi-Square(4) |  | 0.8376 |
|  |          |                     |  |        |
|  |          |                     |  |        |

**Sumber: estimate Eviews**

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel 5, Di peroleh bahwa Prob. Chi-Square = 0,8376 > 0,05 yang berarti menunjukkan bahwa tidak terdapat heteroskedasitas pada uji ini.

**Uji Autokorelasi**

**Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi**

| Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: |          |                     |  |        |
|---|----------|---------------------|--|--------|
|   |          |                     |  |        |
|   |          |                     |  |        |
| F-statistic                                 | 0.372874 | Prob. F(2,8)        |  | 0.7001 |
| Obs*R-squared                               | 1.279048 | Prob. Chi-Square(2) |  | 0.5275 |
|   |          |                     |  |        |
|   |          |                     |  |        |

**Sumber: estimate Eviews**

Berdasarkan dari uji yang sudah dilakukan bisa dilihat pada tabel 6, di peroleh bahwa Prob. Chi-Square = 0,5275 > 0,05 yang menunjukkan bahwa pada uji ini tidak terdapat Autokorelasi.

## Uji Regresi Linier Berganda

**Tabel 7. Hasil Regresi Linier Berganda**

| Dependent Variable: Y      |             |                       |             |          |
|----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| Method: Least Squares      |             |                       |             |          |
| Date: 11/16/24 Time: 22:21 |             |                       |             |          |
| Sample: 2009 2023          |             |                       |             |          |
| Included observations: 15  |             |                       |             |          |
| Variable                   | Coefficient | Std. Error            | t-Statistic | Prob.    |
| C                          | 2.283706    | 0.860895              | 2.652710    | 0.0242   |
| X1                         | 0.412407    | 0.199518              | 2.067022    | 0.0656   |
| X2                         | -0.052539   | 0.028869              | -1.819893   | 0.0988   |
| X3                         | 0.099096    | 0.056321              | 1.759490    | 0.1090   |
| X4                         | 0.047681    | 0.040015              | 1.191561    | 0.2609   |
| R-squared                  | 0.645713    | Mean dependent var    |             | 4.845333 |
| Adjusted R-squared         | 0.503999    | S.D. dependent var    |             | 2.050195 |
| S.E. of regression         | 1.443898    | Akaike info criterion |             | 3.833772 |
| Sum squared resid          | 20.84842    | Schwarz criterion     |             | 4.069788 |
| Log likelihood             | -23.75329   | Hannan-Quinn criter.  |             | 3.831258 |
| F-statistic                | 4.556431    | Durbin-Watson stat    |             | 1.525903 |
| Prob(F-statistic)          | 0.023603    |                       |             |          |

**Sumber: estimate Eviews**

### **Uji Persial (Uji – t)**

Hasil estimati diketahui bahwa:

- Nilai probabilitas Inflasi  $> 0,05$ , yang menunjukkan bahwa secara Inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Nilai probabilitas Investasi Asing  $> 0,05$ , yang menunjukkan bahwa secara Investasi luar negeri tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Nilai probabilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)  $> 0,05$ , yang menunjukkan bahwa secara persial Pajak Pertambahan Nilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Nilai probabilitas Pajak Penghasilan (PPH)  $> 0,05$ , yang menunjukkan bahwa secara persial Pajak Pertambahan Nilai tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

### **Uji Kosisien Determinasi ( $R^2$ )**

Diketahui nilai R-squared sebesar 0,6457 maka dapat disimpulkan bahwa sumbangan pengaruh variabel lain independen terhadap variabel dependen secara simultan bersamaan sebesar 64,57%. Sedangkan sisanya sebesar 35,43% nya dipengaruhi oleh variabel lain.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Variabel inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan dengan prob.  $0,0656 > 0,05$  terhadap pertumbuhan ekonomi dengan koefisien 0,412407. Artinya inflasi mungkin bisa meningkatkan ekonomi namun pengaruh nya tidak terlalu besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak ada dampak yang nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori Kurva Philips, inflasi yang moderat dapat mendorong pertumbuhan karena meningkatkan konsumsi dan investasi. Namun, ketika inflasi terlalu rendah (deflasi) atau terlalu tinggi (hiperinflasi), dampak terhadap pertumbuhan menjadi tidak signifikan karena daya beli masyarakat berkurang atau terjadi ketidakstabilan ekonomi. Penelitian ini tidak sejalan dengan Susanto dan Rachmaati (2013) dengan hasil bahwa inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tidak sejalan dengan penelitian Izzah (2015) dengan hasil inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau, serta tidak sejalan dengan (Rachmadi, 2013) yang menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

### **Pengaruh Penanaman Modal Asing terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh nilai prob.  $0.0988 > 0,05$  yang berarti investasi asing tidak memiliki pengaruh yang mempunyai dampak besar pada pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan nilai koefisien  $-0,052539$  berarti investasi asing (PMA) tidak memiliki dampak nyata dalam perkembangan ekonomi. Secara teori, Penanaman Modal Asing (PMA) dapat berdampak negatif atau tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jika keuntungan dari investasi asing lebih banyak dialihkan kembali ke negara asal (repatriasi laba). Selain itu, investasi asing dapat menyebabkan ketimpangan dalam struktur ekonomi, terutama jika didukung oleh lingkungan kelembagaan yang lemah atau regulasi yang tidak efektif. Dampak positif dari PMA juga berkurang apabila tidak terjadi transfer teknologi atau peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara signifikan. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Jufri dan dkk (2016) dengan hasil bahwa investasi asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tran dan Hoang (2019) yang mengatakan bahwa investasi asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Serta tidak sejalan dengan Dian Setia Ningsih (2020) Penanaman Modal Asing berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh nilai prob.  $0.1090 > 0,05$  yang berarti pajak pertambahan nilai tidak memiliki pengaruh yang mempunyai dampak besar pada pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan nilai koefisien  $0,099096$  berarti pajak pertambahan nilai tidak memiliki dampak nyata dan jelas dalam perkembangan ekonomi. Secara teori, PPN memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk investasi publik. Namun, dampaknya sering tidak signifikan karena Penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat. Efisiensi penggunaan pajak oleh pemerintah yang bervariasi. Struktur regresif PPN yang membatasi dampak redistribusi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yulianti, E., & Setiawan, R. (2015), dalam penelitian mengenai dampak PPN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, menyimpulkan bahwa pengaruh PPN secara positif tetapi tidak signifikan. Mereka menunjukkan bahwa struktur ekonomi dan tingkat penghindaran pajak mungkin membatasi dampak potensial PPN pada pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mahmood, T., & Chaudhary, A. R. (2013) meneliti efek PPN

terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dan menemukan bahwa meskipun PPN berkontribusi positif, efeknya tidak signifikan secara statistik. Mereka mencatat bahwa sistem perpajakan yang belum optimal menjadi kendala. Serta tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Atif, M., & Malik, Q. A. (2012) dalam studi mereka menemukan bahwa meskipun PPN memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Pakistan, pengaruhnya tidak signifikan. Mereka berargumen bahwa faktor-faktor seperti administrasi pajak yang lemah dan tingkat kepatuhan yang rendah dapat menjadi penyebab kurangnya signifikansi tersebut.

### **Pengaruh Pajak Penghasilan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh nilai prob.  $0.2609 > 0,05$  yang berarti pajak penghasilan tidak memiliki pengaruh yang mempunyai dampak besar pada pertumbuhan ekonomi (PDB) dengan nilai koefisien  $0,047681$  berarti pajak penghasilan memiliki dampak nyata dalam perkembangan ekonomi walaupun itu diukur dari jangka panjang dan pendeknya terhadap perkembangan perekonomian. Dalam teori pertumbuhan neoklasik (Solow-Swan), dampak pajak penghasilan terhadap pertumbuhan bersifat netral dalam jangka panjang. Pertumbuhan lebih bergantung pada faktor-faktor seperti teknologi, modal manusia, dan inovasi, bukan kebijakan pajak. Penelitian tidak sejalan dengan penelitian Mertens dan Olea (2013) menemukan bahwa pengurangan tarif pajak penghasilan marginal berkontribusi secara positif terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tidak sejalan dengan penelitian Dackehag dan Hansson (2012) dalam analisis mereka terhadap 25 negara OECD menunjukkan bahwa pajak penghasilan, baik pribadi maupun perusahaan, justru berhubungan negatif dengan pertumbuhan ekonomi, serta tidak sejalan dengan Widmalm (2001) juga menyatakan bahwa struktur perpajakan yang lebih bergantung pada pajak penghasilan cenderung berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian mengenai pengaruh inflasi, investasi asing, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, ditemukan bahwa:

1. Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Meski inflasi dapat memengaruhi konsumsi dan investasi, dampaknya terhadap PDB Indonesia tidak besar.

2. Investasi asing juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, kemungkinan karena keuntungan lebih banyak kembali ke negara asal investor.
3. Pajak pertambahan nilai tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Efisiensi penggunaan pajak dan daya beli masyarakat yang menurun mungkin menjadi penyebabnya.
4. Pajak penghasilan, meskipun menjadi sumber pendapatan utama negara, tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama dalam jangka pendek.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti bahwa variabel-variabel tersebut tidak memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial. Namun, kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang efektif tetap penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

### **Saran**

1. Diversifikasi Kebijakan Ekonomi: Pemerintah perlu mengkombinasikan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih efektif untuk memaksimalkan pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Penguatan Kebijakan Investasi Asing: Fokus pada kebijakan yang mendorong transfer teknologi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar investasi asing memberikan dampak lebih signifikan.
3. Optimalisasi Pemanfaatan Pajak: Pajak, baik PPN maupun PPH, harus digunakan lebih efisien untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung.
4. Stabilisasi Inflasi: Pemerintah perlu menjaga inflasi pada tingkat moderat untuk mendukung daya beli dan investasi tanpa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi.
5. Riset Lanjutan: Perlu dilakukan penelitian tambahan untuk memahami faktor-faktor lain yang lebih signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti tingkat pendidikan, inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya alam.

## DAFTAR REFERENSI

- Amaludin, T. A., Romadhina, A. P., Ekonomi, L. P., Tingkat Inflasi, P., & Daerah, P. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*.
- Amir Salim, F. P. (2021). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 18-25.
- Arta, Y. K. (2013). Pengaruh penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan angkatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. *Economics Development Analysis Journal*, 1-8.
- Aulia Rahma. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 558–572.
- Bâzgan, R. (2018). The impact of direct and indirect taxes on economic growth: An empirical analysis related to Romania. *Proceedings of the International Conference on Business Excellence*, 12, 114 - 127.
- Bimantoro, F. (2016). Pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Media Ekonomi*, 24(1), 63-74.
- Dian Setia Ningsih, H. S. (2020). Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 267-276.
- Irfan, I. (2023). Dampak penanaman modal dalam negeri dan asing terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Bina Bangsa Ekonometrika*, 1-10.
- Liyana, N. F., Apriliasari, V., & Ratnasari, G. A. (2022). Progresivitas pajak penghasilan orang pribadi dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi. *Balance Vocation Accounting Journal*.
- Loganathan, N., Ismail, S. B., Štreimikienė, D., Hassan, A. A., Zavadskas, E. K., & Mardani, A. (2017). Tax reform, inflation, financial development, and economic growth in Malaysia. *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 152-165.
- Mayasari, F., & Mahinshapuri, Y. F. (2022). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *JEB17: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Nasarudin, N. (2023). Analisis pengaruh penanaman modal asing, inflasi, dan indeks harga konsumen terhadap pertumbuhan ekonomi di dua belas wilayah provinsi Jawa Tengah periode tahun 2015-2019. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(1), 84-96.
- Nehemia, S. D., & Prasetyia, F. (2023). Analisis pengaruh penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(1), 26-37.

- Nisa, K. (2024). Pengaruh penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1993-2022 (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Yogyakarta).
- Pasaribu, A. K. (2024). Dampak inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (PDB). *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 89-96.
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*, 1(1).
- Pratama, R. A., & Widyastuti, S. (2022). Pengaruh penerimaan pajak dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Veteran Economics, Management & Accounting Review*.
- Rahma, A. (2024). Pajak penghasilan di Indonesia: Peraturan dan perhitungan. *Neraca*, 558–572.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing dan Perpajakan)*.
- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan. *SIKAP*.
- Sihaloho, E. D. (2020). Analisis pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Forum Ekonomi*, 202-209.
- Simanungkalit, E. F. (2020). Pengaruh inflasi terhadap pertumbuhan. *Journal of Management*, 327-340.
- Sumaryani, N. (2014). Pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Vermeer, T. (2022). The impact of individual income tax. *Tax Foundation*, 2-11.